

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan tersebut sama tuanya dengan manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya sebagai masalah oleh manusia yang bersangkutan.

Kemiskinan seringkali digambarkan sebagai kondisi ketidakmampuan keluarga atau komunitas dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan dan tempat tinggal; tidak mampu menjangkau pelayanan pendidikan sehingga tingkat pendidikannya sangat rendah; tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan modern sehingga angka kesakitan dan kematian cukup tinggi; serta tidak dapat memperoleh modal usaha karena tidak memiliki jaminan atau agunan. Pada banyak keluarga dan komunitas miskin, terjadi sebuah lingkaran kemiskinan yang menahun, yang kemudian dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan. Dimana kemiskinan keluarga dan komunitas tersebut diturunkan kepada anak cucunya secara berkesinambungan. Disisi lain, kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di duniaini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara di jagat raya ini yang kebal dari kemiskinan. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial-ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang

seperti Indonesia, tetapi juga dialami oleh negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat. Semua negara di dunia ini sepakat bahwa kemiskinan merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban. Kemiskinan tidak memilih tempat dimana dia mau hinggap, tidak peduli Negara maju atau pun Negara berkembang dan tidak peduli di perkotaan ataupun di pedesaan. Semua umat di planet ini setuju bahwa kemiskinan harus dan bisa ditanggulangi (Suharto, 2009:14).

Penduduk miskin yang memiliki permasalahan yang lebih kompleks tentang kemiskinan adalah penduduk miskin yang tinggal di perkotaan. Kehidupan kota yang diwarnai dengan materialisme dan individualisme, menyebabkan penduduk miskin di perkotaan sangat kesulitan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mereka mencurahkan hampir seluruh waktunya untuk memperoleh makanan dengan melakukan berbagai aktivitas yang memberikan imbalan ekonomi. Jenis-jenis pekerjaan seperti penarik becak, pedagang asongan jalanan, penjual makanan keliling, penjaja mainan anak-anak, pemulung, tukang cukur jalanan dan buruh lepas; merupakan jenis-jenis aktivitas ekonomi yang banyak ditekuni penduduk miskin di perkotaan. Jenis-jenis aktivitas ekonomi tersebut tentu masih jauh untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan di Indonesia. Kemiskinan yang semakin meningkat akhir-akhir ini dapat menimbulkan beberapa dampak pada sektor sosial, ekonomi, dan politik bagi bangsa Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk miskin hingga Maret 2019 tercatat 9,41 persen dari total jumlah penduduk

Indonesia, atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,82 persen. Data ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan positif. Pasalnya, ketika garis kemiskinan naik, jumlah penduduk miskin malah berhasil diturunkan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019).

Pada tahun 2012 kemiskinan di Indonesia berada diangka 29,25 juta. Kemudian, mengalami penurunan di tahun 2013 diangka 28,17 juta. Selanjutnya, mengalami kenaikan di tahun 2014 dan 2015 dengan jumlah 28,28 juta dan 28,59 juta. Tahun 2016, kembali mengalami penurunan diangka 28,01. Tahun 2017-2019 terus mengalami penurunan secara berturut-turut yaitu 27,77 juta; 25,95 juta; dan 25,14 juta.

**Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Indonesia 2012-2019**

Tahun	Jumlah penduduk miskin (Jt)	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2012	29,25	11,96
2013	28,17	11,36
2014	28,28	11,25
2015	28,59	11,22
2016	28,01	10,86
2017	27,77	10,64
2018	25,95	9,82
2019	25,14	9,41

Sumber : BPS

Di Provinsi Gorontalo sendiri kemiskinan masih sangat tinggi, tercatat Provinsi Gorontalo termasuk 5 provinsi termiskin di Indonesia dan tidak pernah keluar dari 5 besar provinsi termiskin sejak berdirinya pada tahun 2000. Hal ini tentunya menjadi PR bagi pemerintah Povinsi Gorontalo untuk setidaknya menekan/mengurangi kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

**Tabel 1.2 Jumlah penduduk miskin menurut kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo**

Wilayah se provinsi	2015		2016		2017		2018		2019	
	Ribu jiwa	Persen	Ribu jiwa	Persen	Ribu jiwa	Persen	Ribu jiwa	Persen	Ribu Jiwa	Persen
Boalemo	32.19	21.67	32.29	21.11	34.35	21.85	32.83	20.33	31.31	18.87
Kab. Gorontalo	80.52	21.80	78.36	21.03	76.93	20.55	74.64	19.84	68.31	18.06

Pohuwato	32.70	22.43	31.66	21.17	32.56	21.17	30.39	19.40	29.13	18.16
Bone Bolango	28.19	18.49	27.80	17.97	27.91	17.81	27.6	17.40	25.91	16.12
Gorontalo Utara	21.06	18.93	20.06	18.51	21.67	19.23	21.09	18.54	19.46	16.95
Kota Gorontalo	12.18	6.05	12.43	6.05	11.95	5.70	11.91	5.57	11.91	5.45
Provinsi Gorontalo	206.8 4	18.32	203.1 9	17.72	205.3 7	17.65	198.5 1	16.81	186.0 3	15.52

*Sumber : BPS (2020)*

Di Kabupaten Gorontalo kemiskinan juga masih menjadi masalah terbesar, berdasarkan tabel diatas Kab.Gorontalo menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dibandingkan dengan kabupten-kabupaten lainnya di Gorontalo, akan tetapi kabupaten Gorontalo mengalami sejumlah perkembangan.penurunan angka kemiskinan,pertumbuhan ekonomi hingga Indeks pembangunan manusia merupakan beberapa perkembangan yang diraih. Sejak dipimpin oleh Bupati Nelson Pomalingo tingkat kemiskinan di Kabupaten Gorontalo turun dari angka 21,08 %, menjadi 21,03%. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi, naik menjadi 6,62 %, dari sebelumnya 6,31 %.Bupati Nelson menjelaskan, Penurunan Angka Kemiskinan, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia serta peningkatan pertumbuhan ekonomi, merupakan beberapa keberhasilan yang diraih pemerintahannya selama selama ini. Hal ini dikemukakannya pada Dialog RRI Gorontalo.

**Tabel 1.3 Tingkat kemiskinan Kabupaten Gorontalo 2011-2018 :**

Tahun/ Year	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)/ Poverty Line (Rupiahs/capita/month)	Persentase Penduduk Miskin/ Poor People Percentage
2018	409 179	19,84
2017	382 722	20,55
2016	368 863	21,03
2015	343 373	21,80
2014	323 578	21,05
2013	295 852	21,57
2012	271 772	20,79
2011	249 151	21,31

*Sumber :Badanpusatstatistic,survey social ekonomi*

Dalam mengurangi tingkat kemiskinan, Pemerintah Provinsi Gorontalo memfokuskan penyusunan Anggaran dan belanja daerah (APBD) pada pengentasan kemiskinan, hal ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di daerah yang masih mencapai 16,8%. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Gorontalo pada tahun anggaran tahun 2020 diproyeksi mencapai Rp 2 Triliun meningkat 25,8% 2019. Pemprov juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,69 persen, indeks rasio gini 0,39 poin, indeks pembangunan manusia (IPM) 68,71 poin, dan tingkat kemiskinan ditekan hingga di bawah 15 persen. Sedangkan Kabupaten Gorontalo mendapat anggaran yang cukup besar. Anggaran penurunan angka kemiskinan melalui dinas sosial cukup besar yakni RP 6 triliun Melalui APBD dalam kurun waktu 4 tahun. Anggaran ini digunakan pemerintah untuk membuat beberapa program-program untuk menekan/ menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo, termasuk di antaranya

program di sektor perlindungan sosial dan juga di bidang pertanian. Seperti yang kita tau sektor perlindungan sosial dan pertanian sangat berperan penting terhadap penurunan dan pengetasan kemiskinan. Untuk mengurangi/mengatasi kemiskinan melalui sektor perlindungan sosial dan pertanian pemerintah Kabupaten Gorontalo telah membuat beberapa program untuk mendukung sektor perlindungan sosial dan pertanian. Berikut beberapa program penurunan angka kemiskinan melalui sektor perlindungan sosial dan di sektor pertanian di Kabupaten Gorontalo:

1. Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
4. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan
7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

kemiskinan melalui sektor perlindungan sosial dan pertanian, dan juga telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar yaitu sekitar 6 triliun dalam kurun waktu 4 tahun, namun penurunan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo tidak signifikan atau terbilang lambat, hal ini juga dibenarkan oleh wakil ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa, Beliau mengatakan, ”anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pengetasan kemiskinan di

Kabupaten Gorontalo cukup besar, namun penurunan kemiskinan belum memperlihatkan hasil yang signifikan”.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian tentang **”Efektivitas Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Sektor Perlindungan Sosial dan Pertanian di Kabupaten Gorontalo”**.

### **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses penganggaran di dalam program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.
2. Bagaimana detail apa saja anggaran yang di keluarkan dalam program pengentasan kemiskinan melalui sektor perlindungan sosial dan pertanian.
3. Bagaimana kebijakan anggaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial dan pertanian terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. proses penganggaran di dalam program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.
2. detail anggaran yang di keluarkan dalam program pengentasan kemiskinan melalui sektor perlindungan sosial dan pertanian.
3. kebijakan anggaran pemerintah pada sektor perlindungan sosial dan pertanian terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terdiri dari :

##### **2. Manfaat Teoritis**

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

###### **1) Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya atau bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang kebijakan anggaran kemiskinan

###### **2) Bagi Peneliti**

Sebagai bahan masukan didalam menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan wawasan di bidang ekonomi pembangunan khususnya tentang kebijakan anggaran terhadap kemiskinan.

##### **3. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan digunakan untuk kesesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan di lapangan serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan maupun metode yang sama.